

12-1-2007

Gerakan Budaya Menjelang Kemerdekaan Indonesia-Malaysia

Maman S. Mahayana

Program Studi Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia, maman_s_mahayana@yahoo.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/hubsasia>

Recommended Citation

Mahayana, M. S. (2007). Gerakan Budaya Menjelang Kemerdekaan Indonesia-Malaysia. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 11(2), 48-56. <https://doi.org/10.7454/mssh.v11i2.110>

This Original Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Makara Human Behavior Studies in Asia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

GERAKAN BUDAYA MENJELANG KEMERDEKAAN INDONESIA-MALAYSIA

Maman S. Mahayana

Program Studi Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia

E-mail: *maman_s_mahayana@yahoo.com, maman_s_mahayana@telkom.net, mahayana@ui.edu*

Abstrak

Sejarah panjang hubungan sosial budaya Indonesia dan Malaysia telah memperlihatkan bahwa kedua bangsa ini memiliki akar tradisi sosial-budaya yang sama. Ikatan emosional itu ternyata sama sekali tidak terganggu selepas Perjanjian London tahun 1824 yang disepakati pemerintah kolonial Inggris dan Belanda. Meskipun perjanjian ini secara politik telah membelah Kerajaan Melayu ke dalam dua wilayah politik yang berbeda, yaitu Singapura (Temasek) dan Johor berada di bawah kekuasaan Inggris sedangkan Riau dan Lingga berada di bawah kekuasaan Belanda, hubungan sosio-kultural masyarakat di wilayah semenanjung itu tetap berlangsung baik dan sama sekali tidak terganggu oleh keputusan politik kedua pemerintah kolonial itu. Bahkan, ketika terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia, masyarakat di wilayah itu tetap mondar-mandir melakukan hubungan sosial, budaya, dan perdagangan. Gerakan budaya ternyata begitu penting bagi masyarakat di kawasan ini. Hal itu pula yang terjadi menjelang kedua negara memperoleh kemerdekaan.

Abstract

For a long period, the Indonesian and Malaysia relationship has proved the single root of socio-cultural tradition. Yet, the London Treaty 1824, an agreement between the British and Dutch colonials, failed to split the emotional bond between the two nations. Although this treaty successfully divided the Malay Kingdom into two different political region, where Singapore (Temasek) and Johor was politically put under British rule while Riau and Lingga was put under the Dutch, the socio-cultural communication among the people in those areas remained undisturbed by the political decision of the two colonial rulers. Even, during the Indonesia-Malaysia confrontation period, the people were persistently busy keeping their own business in the social, cultural and trade affairs. Hence, specifically since the day prior to their independence, the cultural movement is considerably significant for the people in this region.

Keywords: Indonesian and Malaysian relationship makes a long time ago

1. Pendahuluan

Sudah sejak lama hubungan sosial budaya Indonesia dan Malaysia, terutama masyarakat di kawasan Semenanjung terjalin dengan sangat baik. Berbagai persoalan politik, baik yang terjadi pada zaman kolonial Belanda—Inggris, maupun ketika pecah konfrontasi Indonesia Malaysia, tidak begitu berpengaruh dalam hubungan tradisional di bidang perdagangan dan kehidupan sosial bagi masyarakat di kawasan itu. Belakangan, ketika Pemerintah Pusat pada zaman Orde Baru mengeksploitasi kekayaan alam di Propinsi Riau dan dikembangkannya Pulau Batam dalam wilayah administrasi pemerintahan yang lebih otonom sebagai kawasan otorita, masyarakat Melayu di Propinsi Riau seperti tersisihkan dari wilayahnya sendiri. Pembangunan perumahan elite di Batam dihuni justru

bukan oleh penduduk setempat melainkan penduduk pendatang. Kilang Minyak di Dumai yang berdiri megah sama sekali tidak berpengaruh bagi taraf hidup masyarakat Melayu yang berada di sekelilingnya. Masyarakat Melayu makin tersisih dan menempati gubuk-gubuk di pedalaman.

Ketimpangan sosial itu menumbuhkan kesadaran masyarakat Melayu tentang terjadinya ketidakadilan yang dilakukan Pemerintah Pusat. Sementara itu, masyarakat Melayu di Malaysia dan Singapura, justru sejahtera. Traktat London yang membelah kerajaan Melayu ke dalam dua wilayah politik yang berbeda dianggap sebagai kecelakaan sejarah, awal malapetaka sehingga terjadi ketersisihan puak Melayu sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Jakarta sebagai representasi Pemerintah Pusat makin

memperlihatkan ketidakadilannya. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor masyarakat di Propinsi Riau cenderung berorientasi ke Malaysia dan Singapura daripada ke Jakarta dalam usaha mereka mencari kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat di kawasan itu.

2. Masalah

Bagaimana sesungguhnya hubungan masyarakat Melayu di Riau dengan masyarakat Melayu lainnya di kawasan Malaysia dan Singapura dalam hubungan serantau? Bagaimana pula duduk perkaranya dilihat dari perspektif sejarah? Bagaimana penduduk di kawasan Semenanjung ini mempunyai ikatan emosional sebagai warga sepuak, sesama Melayu? Beberapa pertanyaan itu coba ditelusuri dan diungkap dalam tulisan ini.

3. Posisi Riau dalam Keserantauan

Menempatkan Riau sebagai titik perhatian dalam konteks hubungan serantau, mengandung implikasi pada dua hal. Pertama, Riau sebagai bagian dari Indonesia dan kedua, Riau sebagai bagian dari puak Melayu. Sebagai bagian dari Indonesia, Riau merupakan wilayah politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia telah menjadi fakta politik dari keindonesiaan. Sebagai puak Melayu, Riau mempunyai hubungan sosio-kultural dengan komunitas yang melewati batas-batas geografi politik. Ia menjadi bagian dari kebudayaan Melayu yang masyarakatnya berada dan mendiami wilayah Semenanjung. Dengan begitu, ada dua sayap yang dapat dikembangkan Riau, yaitu sayap politik yang berkaitan dengan persoalan keindonesiaan, dan sayap budaya yang wilayahnya justru melampaui batas-batas politik negara kesatuan Indonesia. Oleh karena itu, pembicaraan masa lalu, masa kini, dan masa depan Riau, di dalamnya terkait dua aspek tadi, yaitu politik dan budaya.

Sebelum lebih jauh membicarakan posisi Riau sebagai bagian dari keindonesiaan, ada baiknya kita melakukan kilas balik mengungkap serba sedikit peristiwa seputar kemerdekaan Indonesia—Malaysia.

4. Catatan Sejarah

Pembicaraan masa lalu Riau sesungguhnya berkaitan erat dengan sejarah lokal dan sejarah sosial yang terjadi di kawasan Semenanjung. Di dalamnya, tidak terelakan, kita harus menyinggung peristiwa “terbelahnya” kehidupan sosial politik yang diakibatkan oleh Perjanjian London, Mei 1824, antara Inggris dan Belanda. Sebuah peristiwa politik kolonial yang memisahkan masyarakat Sumatera dari masyarakat Melayu. Dalam perjanjian itu, telah disepakati bahwa Inggris berhak menguasai Singapura dan Malaka

terhitung Agustus 1824, dan Belanda berhak atas Bangkahulu (Sumatera Selatan). Perjanjian ini juga sekaligus berarti membagi dua kerajaan Riau—Lingga—Johor dan Pahang dalam wilayah kekuasaan Inggris dengan sempadan Selat Singapura.¹

Itulah awal berpisahnya hubungan secara politik antara masyarakat Melaka, Johor, Singapura, dan kawasan Semenanjung dengan masyarakat Riau dan komunitas Melayu kepulauan itu. Keputusan politik itu tentu saja hanya didasari kepentingan pihak kolonial (Belanda dan Inggris). Lewat perjanjian itu, Inggris dapat memusatkan kekuasaannya di negeri-negeri Selat, sementara Belanda dapat lebih efektif mengontrol wilayah laut di kawasan itu. Jadi, kesepakatan itu sama sekali tak mempertimbangkan aspek sosio-kultural.² Keputusan politik kolonial yang mengabaikan semangat dan dinamika budaya masyarakat.

Meski secara politik ada batas geografi yang jelas antara masyarakat Semenanjung dan Riau yang dikuasai oleh dua negara kolonial dengan kebijaksanaan politik yang berbeda, hubungan sosio-kultural kedua masyarakat yang bersangkutan tetap berlangsung seolah-olah perjanjian London itu tidak pernah ada. Dengan demikian, hubungan sosial-budaya yang telah berlangsung sejak lama dalam kehidupan masyarakat rumpun Melayu, tidak dapat dipisahkan begitu saja melalui keputusan politik. Inilah contoh, betapa hubungan budaya jauh lebih mengakar dan dapat melampaui batas-batas politik dan geografi.

Ketika Jepang memasuki Semenanjung Melayu menggantikan kekuasaan kolonial Inggris, 15 Februari 1942,³ dan menduduki Jawa menggantikan kekuasaan Belanda, 8 Maret 1942,⁴ makin mempererat hubungan sosio-kultural kedua masyarakat di Semenanjung ini. Jepang menyatukan Tanah Melayu dan Sumatera yang

¹ Maman S. Mahayana, *Akar Melayu: Sistem Sastra & Konflik Ideologi di Indonesia dan Malaysia* (Magelang: Indonesia Tera, 2001), hlm. 3. Lihat juga, Barbara Watson Andaya dan Virginia Matheson, “Pikiran Islam dan Tradisi Melayu,” Anthony Reid & David Marr, *Dari Raja Ali Haji hingga Hamka* (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hlm. 98—100.

² Dalam banyak kasus, seperti pembuatan jalan di Jawa (yang melahirkan perang Diponegoro), penerapan pajak di Garut (pemberontakan Cimarama) dan Padang (pemberontakan belasting), Belanda sama sekali tidak mempertimbangkan aspek sosial, budaya, bahkan agama.

³ Kedatangan Jepang ke Tanah Melayu terjadi 8 Desember 1941, sehari setelah kapal perang Inggris “Prince of Wales” dan “Repulse” di luar pantai Kuantan, negeri bagian Pahang, ditenggelamkan angkatan laut Jepang. Pihak Inggris berusaha melakukan perlawanan dan akhirnya menyerah tanggal 15 Februari 1942.

⁴ Kedatangan Jepang ke Indonesia sama sekali tidak mendapat perlawanan dari pihak Belanda. Dalam tempo tidak lebih dari sehari setelah Jepang datang, Belanda meninggalkan Indonesia dan mengungsi ke Australia.

tentu saja disambut gembira oleh kedua masyarakat di wilayah itu.

5. Selepas Zaman Jepang

Meski pendudukan Jepang, khususnya di Indonesia dan Semenanjung Melayu, telah meninggalkan jejak yang amat dalam sebagai potret buram pemerintahan fasis, kalangan sejarawan mengakui, bahwa di balik itu, ada angin kebangsaan –nasionalisme— yang dihembuskan pihak Jepang, terlepas dari persoalan kepentingan yang melatarbelakanginya. Itulah pengalaman masa lalu bangsa-bangsa yang pernah merasakan keganasan pendudukan Jepang. Sebuah catatan sejarah yang tidak patut terulang kembali dalam bentuk apa pun.

Di Indonesia, pelarangan penggunaan bahasa Belanda telah menempatkan kedudukan bahasa Indonesia menjadi sangat penting, baik untuk urusan resmi pemerintahan maupun urusan hubungan kemasyarakatan.⁵ Di Malaysia, bahasa Inggris dinyatakan diganti oleh bahasa Jepang atau bahasa Melayu. Pengaruhnya tentu saja besar dalam memapankan dan mengangkat kedudukan bahasa Melayu. Dalam hal ini, terbuka peluang bagi tokoh-tokoh pergerakan Melayu untuk menyebarkan semangat kebangsaan kemelayuan, sebagaimana yang kemudian dilakukan Ibrahim Haji Yaakob, Abdul Rahim Kajai, atau Ishak Haji Muhammad. Tambahan pula, pendudukan Jepang atas Malaysia di dalamnya tercakup wilayah pulau Sumatera. Dengan demikian, pihak Jepang seolah-olah telah “mengembalikan lagi” hubungan sosio-kultural Sumatera-Melayu yang pernah terputus akibat perjanjian London itu.

Pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Jepang dalam kebijaksanaan pemerintah pendudukan Jepang di Semenanjung Melayu, tentu saja mendapat sambutan yang baik dari pihak masyarakat Melayu sendiri.

Bagi Ibrahim Haji Yaakob dan tokoh-tokoh pergerakan Melayu lulusan Maktab Perguruan Sultan Idris, terangkatnya bahasa Melayu menggantikan bahasa Inggris, boleh jadi dianggap sebagai “kemenangan” psikologis dalam tarik-menarik menghadapi pengaruh golongan terpelajar lulusan Maktab Perguruan Kuala Kangsar yang menempatkan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Dengan begitu, di samping keberhasilan

propaganda Jepang dalam mengangkat harkat bangsa Asia, kedatangan Jepang ke Malaysia, awalnya –sedikit banyak—mendapat sambutan positif dari kalangan tokoh pergerakan Malaysia sendiri.

Selain itu, hubungan golongan terpelajar dan para pemuda pergerakan Indonesia—Melayu yang berasal dari Maktab Perguruan Sultan Idris yang sejak awal berdirinya maktab itu memang sudah terjalin dengan baik, makin memberi penyadaran akan adanya kesamaan perasaan senasib—sepenanggungan dan tujuan cita-cita yang sama: mencapai kemerdekaan dan terlepas dari belenggu penjajahan. Kedekatan hubungan itu ditandai pula dengan tersebar luasnya bahan-bahan bacaan dari Indonesia di tanah Melayu.

Terdapat majalah-majalah yang memuatkan tulisan bersama dari pengarang-pengarang Indonesia dan Tanah Melayu; *Semangat Asia* yang diterbitkan di Singapura sering memuatkan tulisan-tulisan Adinegoro, Mohammad Hatta, Abdul Rahim Kajai, dan Ishak Haji Muhammad yang membawakan penyatuan suara dalam perjuangan mengancam atau menentang penjajah serta membangkitkan kesedaran rakyat di tanah Melayu dan Indonesia.⁶

Di Indonesia, tanggapan yang baik atas kedatangan Jepang, juga datang dari tokoh-tokoh pergerakan, termasuk golongan terpelajar dan seniman. Propaganda Jepang mengenai kebesaran kebudayaan bangsa Timur yang sangat bertentangan dengan kebijaksanaan kolonial pemerintah Belanda, telah berhasil menggugah emosi dan sentimen tokoh-tokoh pejuang Indonesia. Hal tersebut memang merupakan salah satu cara yang dilakukan pihak Jepang untuk menarik simpati, dan lebih jauh lagi, dukungan bangsa Asia, khususnya bangsa yang wilayahnya berada dalam pendudukan Jepang, dalam usaha tentara Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Pidato P.J.M. Goenseikan pada saat peresmian Kantor Besar Pusat Kebudayaan (*Keimin Bunka Shidosho*) di Jakarta, 18 September 1943 yang sebagian dikutip di bawah ini, memperlihatkan bagaimana besarnya perhatian pihak Jepang dalam 'memanfaatkan' kebudayaan sebagai alat propaganda.

Keboedajaan itoe djiwa bangsa, pengaroeh keboedajaan pada segenap lapangan dalam masjarakat, besar dan loeas; madjoe atau moendoernja itoe bergantoeng pada keboedajaan. Oleh karena itoe berkembang soeboer atau tidaknja benih keboedajaan itoe adalah soeatoe soal yang maha penting sekali.

Teristimewa poela sebagian besar benoea Asia, -- Indonesia termasoek joega dalam lingkongan itoe—jang selama ini dibawah tindasan bangsa Barat, terpaksa

⁵ Studi mendalam dan luas mengenai keberhasilan bahasa Melayu menjadi bahasa yang punya kedudukan penting di Nusantara dan kegagalan bahasa Belanda menyebar dan berakar di bekas wilayah jajahannya, telah dilakukan Kees Groeneboer, *Jalan ke Barat: Bahasa Belanda di Hindia Belanda 1600—1950*, (Jakarta: Erasmus Taalcentrum, 1995). Bagian mengenai pelarangan bahasa Belanda pada zaman Jepang dibicarakan pada halaman 426–434.

⁶ Kamaruzzaman Abd. Kadir, *Nasionalisme dalam Puisi Melayu Modern: 1933--1957*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982), hlm. 14.

menerima keboedajaan yang hampa belaka, keboedajaan yang meroesak binasakan Keboedajaan Timoer Asli dan ada poela yang hidoepnja seoempama kerakap toemboeh dibatoe, hidoep segan mati tak maoe. Hal itu sangat mengecewakan hati kita sekalian.

Akan tetapi peperangan Asia Timoer Raja dewasa ini telah menjadikan bangsa Asia yang tidoer njenjak... Peperangan Asia Timoer Raja seolah-olah telah mendjadi api oenggoen yang membangoenkan kembali Keboedajaan Timoer yang djaoeh lebih tinggi dari Keboedajaan Barat. ...⁷

Terlepas dari kepentingan politik yang ingin dicapai pihak Jepang di balik propagandanya mengangkat kebudayaan Timur, bagi beberapa tokoh pergerakan di Malaysia, masalah itu justru makin menguatkan tekad mereka untuk menyatukan tanah Melayu ke dalam wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, ketika di Indonesia dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia,⁸ Maret 1945, Ibrahim Haji Yaakob segera mendesak pihak Jepang bahwa jika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Tanah Melayu agar dimasukkan pula ke dalam wilayah Indonesia Raya.⁹ Usaha itu pun diikuti dengan menghubungi golongan nasionalis Indonesia yang sedang menyusun Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, agar kemerdekaan Indonesia mengikutsertakan Tanah Melayu,¹⁰ yang ternyata disetujui pula oleh golongan nasionalis Indonesia. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan bagi tokoh-tokoh pergerakan Melayu dalam usahanya mencapai kemerdekaan. Dalam pada itu, pihak Jepang sendiri terkesan ikut mendorong usaha-usaha itu. Realisasinya adalah diadakannya pertemuan antara Prof. Akamatsu dari pihak Jepang dan wakil Kesatuan Melayu Muda (KMM), Ibrahim Yaakob, Hassan Manan, Onan Siraj, dan Ramly Hj. Tahir, 26 Juli 1945 di Singapura. Hasilnya adalah bahwa pihak

Jepang menyatakan kesediaannya untuk memberi kemerdekaan bagi Tanah Melayu.

Dua hari berikutnya, diadakan pula pertemuan kedua yang dari pihak Jepang diwakili Prof. Itagaki. Dalam pertemuan itu, pihak Jepang meminta agar Ibrahim Yaakob dan kawan-kawan segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk kepentingan kemerdekaan Tanah Melayu. Dari sinilah kemudian dibentuk KRIS (Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung), akhir Juli 1945, yang merupakan semacam penyusunan kembali KMM,¹¹ dengan Ibrahim Yaakob dan Dr. Burhanuddin Al-Helmy sebagai pimpinannya.¹²

Sementara itu, di Indonesia sendiri pematangan ke arah kemerdekaan Indonesia terus dipersiapkan. Situasinya menjadi amat mungkin karena kondisi balatentara Jepang yang terus mengalami kekalahan dalam berbagai pertempuran. Puncak kekalahan itu terjadi saat bom atom dijatuhkan di Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945). Di luar kehancuran kedua kota di Jepang itu, di Jakarta, 7 Agustus 1945, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menggantikan kedudukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Situasi Jepang yang makin terpojok itu, ditambah dengan adanya pernyataan perang terhadap Jepang dari Uni Soviet, 8 Agustus 1945, telah memaksa Jepang memasuki saat yang paling sulit; menyerah kalah kepada pihak Sekutu dan melepaskan semua wilayah pendudukannya. Bagi Panglima Wilayah Selatan (Panglima Tertinggi Tentara Jepang untuk Asia Tenggara) Marshall Terauchi Hisaichi, tak ada pilihan, kecuali memenuhi janji memberi kemerdekaan kepada Indonesia, di dalamnya termasuk Tanah Melayu.

Pada tanggal 8 Agustus 1945, Sukarno, Hatta dan Radjiman, terbang ke Dalat, Saigon, memenuhi undangan Terauchi.¹³ Dalam pertemuan itu, Terauchi

⁷ *Keboedajaan Timoer*, No. 1, 18 September 2603, hlm. 1.

⁸ Li Chuan Siu, *Iktisar Sejarah Pergerakan dan Kesusasteraan Melayu Modern 1945—1965* (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1967), hlm. 23--24. Li menyebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai Panitia Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia yang menurutnya dibentuk bulan Mei 1945.

⁹ Menurut Zainal Abidin Abdul Wahid, (*Sejarah Malaysia Sepintas Lalu*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1979; 151), bahwa pihak Jepang pun menjanjikan kepada tokoh-tokoh Melayu bahwa kemerdekaan akan diberikan juga kepada Tanah Melayu, sama seperti yang dijanjikan kepada Indonesia.

¹⁰ Shahaarom Hussain, *Biografi Perjuangan Politik Dato' Jaafar*, (Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1985), hlm. 70. Dalam Arkib Negara Malaysia dari fail SP 89/112 yang bertajuk "Persetujuan Jepang untuk Kemerdekaan Tanah Melayu" dinyatakan bahwa janji Jepang untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia telah mendorong golongan nasionalis KRIS (Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung) untuk mengikutsertakan Tanah Melayu dalam kemerdekaan Indonesia.

¹¹ Dalam Li Cuan Siu, KRIS dinyatakan oleh para pembesar Jepang sebagai Kesatuan Rakyat Istimewa, sedangkan Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung adalah versi Ibrahim Yaakob dan kawan-kawan. Tetapi dalam Barbara W. Andaya (1983: 291) dan Khoo Kay Kim (1991: 244), KRIS yang semula merupakan kependekan dari Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung diganti namanya menjadi Kekuatan Rakyat Indonesia Istimewa.

¹² Kamaruzzaman Abd. Kadir, *Op. Cit.*, hlm. 15

¹³ Menurut Arkib Negara Malaysia dari fail SP 89/122 yang berjudul "Persetujuan Jepang untuk Kemerdekaan Tanah Melayu," dinyatakan bahwa dalam perjalanan ke Dalat, Saigon itu, rombongan Indonesia singgah dahulu di Singapura, dan beberapa orang di antara delegasi dari Indonesia itu, tidak ikut Sukarno--Hatta--Radjiman ke Dalat, tetapi tetap tinggal di Singapura untuk mengadakan perundingan dengan pimpinan KRIS untuk membicarakan kembali penyatuan Malaya--Indonesia.

berjanji akan memberi kemerdekaan bagi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, dengan catatan tidak memasukkan Malaya dan wilayah-wilayah Inggris di Kalimantan.¹⁴ Dalam perjalanan pulang ke Indonesia, rombongan Sukarno--Hatta singgah dahulu di Taiping, 11 Agustus 1945 dan esok harinya (12 Agustus 1945) mengadakan perundingan dengan Ibrahim Yaakob dan Burhanuddin selaku pimpinan KRIS sehubungan dengan persiapan penggabungan kemerdekaan Indonesia--Tanah Melayu.¹⁵ Dalam pertemuan itu, Sukarno menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan diselenggarakan minggu berikutnya.¹⁶ Ibrahim Yaakob juga menyatakan bahwa ia akan mengirimkan wakil-wakil dari Tanah Melayu dan wakil KRIS ke Jakarta untuk hadir mengikuti upacara kemerdekaan Indonesia.

Berbagai perundingan dan rencana boleh dipersiapkan. Perjalanan sejarah ternyata harus mencatat lain. Rencana yang telah dipersiapkan lewat berbagai perundingan itu, tinggal hanya rencana. Pernyataan menyerah tanpa syarat dari pihak Jepang kepada Sekutu 14 Agustus, kapitulasi Jepang kepada Sekutu, 15 Agustus dan "penculikan" Sukarno—Hatta ke Rengasdengklok, 16 Agustus oleh kelompok pemuda radikal, Sukarni dan kawan-kawan, dan dorongan kuat dari pimpinan dan para pejuang kemerdekaan Indonesia sendiri, telah "memaksa" Sukarno--Hatta bertindak cepat dan "dalam tempo yang sesingkat-singkatnya; segala sesuatu berjalan begitu cepat. Malam harinya, persiapan dilakukan. Teks proklamasi disusun. Bendera merah-putih, disiapkan.

Tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10.00 wib, di Jln. Pegangsaan Timur, No. 56, teks proklamasi dibacakan, bendera Sang Saka Merah-Putih dikibarkan, dan Lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Itulah saat Indonesia menyatakan kemerdekaan, tanpa di dalamnya memasukkan wilayah Tanah Melayu.

¹⁴ Lihat MC Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 315. Dalam bagian ini, Ricklefs sama sekali tidak menyinggung pertemuan Sukarno--Hatta dan Ibrahim Yaakob--Burhanuddin di Taiping, 12 Agustus 1945. Mengenai tanggal pertemuan delegasi Indonesia (Sukarno, Hatta dan Radjiman dengan Terauchi), Ricklefs mencatatnya tanggal 11 Agustus 1945. Lihat Li Cuan Siu, *Op. Cit.*, hlm. 26. Lihat juga Mustapha Hj. Hussain, "Dari KMM kepada UMNO," *Nadi Insan*, September 1980, hlm. 6.

¹⁵ Kamaruzzaman Abd. Kadir, *Op. Cit.*, hlm. 15.

¹⁶ Jika berpegang pada pernyataan itu, minggu berikutnya yang dimaksud adalah setelah tanggal 19 Agustus 1945. Menurut Khoo Kay Kim (1991: 39), rencana semua kemerdekaan Indonesia akan diselenggarakan bulan September 1945, tetapi kemudian dimajukan lagi menjadi tanggal 24 Agustus 1945. Dengan begitu boleh jadi rencana kemerdekaan Indonesia sesuai perundingan Sukarno--Hatta--Radjiman dengan Terauchi telah ditetapkan tanggal 24 Agustus 1945.

6. Menjelang Kemerdekaan Malaysia

Berakhirnya Perang Pasifik dengan kekalahan berada di pihak Jepang, telah mendorong negara-negara Eropa -- paling tidak, Belanda dan Inggris-- yang pernah mempunyai tanah jajahan di wilayah Asia Tenggara, merasa perlu menengok kembali koloninya yang dulu ketika diserang Jepang, mereka tinggalkan begitu saja. Bagi Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya, persoalannya tinggal, bagaimana mempertahankan kemerdekaannya itu; mengisinya dan menjalankan roda pemerintahan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

Sementara itu, tahun-tahun awal selepas berakhir perang Pasifik, bagi Malaysia persoalannya lain lagi. Bagi Malaysia, kemerdekaan yang dicapai Indonesia tanpa melibatkan Tanah Melayu, seolah-olah merupakan sebuah rangkaian perjalanan yang berakhir dengan kegagalan. Sungguhpun demikian, semangat untuk mencapai cita-cita menjadikan Malaysia sebagai negara yang merdeka, tidak sama sekali pudar; perjuangan mesti dilanjutkan. Ibrahim Yaakob dan beberapa pemimpin KRIS lainnya kemudian terbang ke Indonesia dan selanjutnya melakukan perjuangannya dari Indonesia.¹⁷

Sebenarnya pemimpin-pemimpin KRIS yang hendak memetik buah perjuangannya berupa kemerdekaan bersama Indonesia, merasa sangat terpukul. Menyusul kemudian, 20 Agustus 1945, PETA (Pembela Tanah Air), dibubarkan, dan berikutnya, KRIS mengalami nasib yang sama. Pembubaran PETA dan KRIS menyusul kekalahan Jepang, keterlambatan pasukan Inggris datang kembali ke bekas koloninya, dan tidak munculnya reaksi cepat dari para sultan untuk menguasai keadaan waktu itu, telah menyebabkan Tanah Melayu laksana 'daerah tak bertuan.' Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan Partai Komunis Malaysia (PKM) untuk tampil sebagai penguasa. PKM yang sebagian besar anggotanya terdiri dari orang-orang Cina, berhasil menguasai lebih dari separoh Tanah Melayu. PKM yang pada zaman Jepang, tenggelam karena diharamkan tiba-tiba muncul laksana singa lapar. Mereka yang dulu dianggap pro Jepang, ditangkap, dihukum dan dibunuh. Pembantaian itu juga berlaku bagi orang-orang Cina sendiri yang pro Kuomintang.

Peristiwa yang bermula selepas pertengahan Agustus 1945 itu terjadi sampai awal September 1945. Masalahnya kemudian merembet ke konflik etnik. PKM

¹⁷ Perjuangan Ibrahim Haji Yaakob untuk menyatukan Malaysia dengan Indonesia ternyata tidak pernah terwujud sampai akhirnya ia meninggal tanggal 9 Maret 1979. Sebagai penghargaan atas perjuangannya membantu Indonesia, Yaakob dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata, 10 Maret 1979.

yang didominasi etnis Cina, telah diidentikkan oleh masyarakat Melayu sebagai orang-orang Cina secara keseluruhan. Maka tidak terhindarkan, kerusuhan rasial pun terjadi.¹⁸ Pada saat kerusuhan itu merebak ke beberapa kota di Tanah Melayu, antara lain, Batu Pahat, Batu Kikir, Kuala Pilah (Negeri Sembilan), Kuala Kangsar (Perak), Raub (Pahang), Sungai Manik, Lambar Kanan, dan Pantai Remis, Pasukan Inggris datang dan memberlakukan Pentadbiran Militer Inggris (*British Military Administration*) 5 September 1945. Satu hal yang sangat kebetulan, Inggris berhasil meredam kerusuhan rasial itu. Dengan demikian, kedatangan Inggris, sungguh terjadi pada saat yang tepat. Sebab, ketika Tanah Melayu dilanda kerusuhan rasial, saat itulah Inggris datang dan dianggap dapat menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu pula, kedatangan Inggris mendapat sambutan yang cukup baik.

Meskipun kerusuhan rasial dapat dipadamkan, PKM sendiri masih terus melakukan aksinya. Paling tidak, mereka telah berhasil menyelusupkan anggota-anggotanya ke dalam serikat-serikat pekerja (*Labour Union*) yang belakangan kemudian dapat mendirikan Serikat Pekerja Pusat (*Central Labour Union*) di Singapura pada bulan Oktober 1945.

Ketika trauma kerusuhan rasial dan permusuhan etnis Cina-Melayu belum sama sekali padam, Inggris mengumumkan sebuah rencana pembentukan Kesatuan Malaya (*Malayan Union*), 10 Oktober 1945. Banyak pihak yang menentang gagasan tersebut. Masalahnya, beberapa butir dari rencana pembentukan *Malayan Union* dipandang akan sangat merugikan golongan Melayu dan raja-raja Melayu. Beberapa butir gagasan tersebut, antara lain, bahwa kekuasaan dalam *Malayan Union* akan dipegang oleh seorang gubernur, sementara kekuasaan raja-raja dibatasi hanya untuk urusan adat-istiadat dan soal-soal yang menyangkut agama (Islam). Butir lain yang amat ditentang masyarakat Melayu adalah pemberian kelonggaran kewarganegaraan bagi orang yang dilahirkan di Tanah Melayu. Kaum pendatang (etnis Cina dan India) yang memainkan peranan penting dalam perekonomian Tanah Melayu diberi hak kerakyatan yang sama dengan orang Melayu. Dengan begitu, orang Melayu sebagai pribumi kehilangan hak istimewanya.

Sementara itu, kelompok nasionalis radikal dan beberapa mantan anggota KRIS, kembali tampil dalam usaha memperjuangkan penggabungan Malaysia-Indonesia. Beberapa tokohnya antara lain Dahari Ali, Mokhtaruddin Lasso, Dr. Burhanuddin Al-Helmy dan Zulkifli Owni mendirikan Partai Kebangsaan Melayu-

Malaya (PKMM), 17 Oktober 1945. Inilah partai pertama di Tanah Melayu yang didirikan pascaperang. Dari slogan partainya: "Indonesia-Malaya Satu" jelas, ke arah mana orientasi perjuangan partai ini.¹⁹

Menghadapi rencana Inggris untuk membentuk *Malayan Union*, pada mulanya PKMM menyetujuinya.²⁰ Belakangan setelah menyadari bahwa pembentukan *Malayan Union* lebih banyak merugikan golongan Melayu, PKMM kemudian menentang keras, terutama yang menyangkut pembatasan kekuasaan politik sultan-sultan, pemberian kemudahan hak kewarganegaraan bagi golongan non-pribumi, tindakan Inggris yang tak demokratis terhadap para sultan dalam usaha memperoleh tanda tangan sultan-sultan sebagai persetujuan pembentukan *Malayan Union*, dan pemisahan Singapura dari Malaysia.

Pada saat yang hampir bersamaan, Dato Onn Jaafar mendirikan organisasi kemelayuan yang bernama Pergerakan Melayu Semenanjung. Tujuannya, antara lain, menyatukan orang-orang Melayu dalam menentang Inggris, khususnya yang menyangkut pembentukan *Malayan Union*. Langkah pertama adalah dengan menyelenggarakan Kongres Melayu se-Malaya. Langkah ini kemudian mendapat sambutan yang baik, terutama dari organisasi-organisasi Melayu. Maka, pada tanggal 1--4 Maret 1946, diselenggarakanlah Kongres Melayu pertama di Kuala Lumpur. Tiga hal penting yang dihasilkan kongres ini adalah: (1) mendirikan Pertumbuhan Kebangsaan Bersatu (Pekembar) atau yang lebih dikenal dengan nama UMNO (*United Malays National Organization*),²¹ (2) menolak pembentukan *Malayan Union*, dan (3) merencanakan dan menyusun sistem pendidikan untuk anak-anak Melayu agar lebih lancar.

Dalam kongres tersebut, PKMM termasuk partai politik Melayu yang ikut memprakarsai berdirinya UMNO. Sebagai salah satu organisasi pemrakarsa berdirinya UMNO, PKMM juga kemudian masuk dan bergabung ke dalam UMNO. Perjuangan kedua organisasi ini membuahkan hasil yang baik. Setelah pertemuan bulan Juni 1946 antara delegasi Inggris yang diwakili Malcolm MacDonald dan Edward Gent, dan wakil raja-raja Melayu dan wakil UMNO, pihak Inggris kemudian memutuskan, sejak 1 Juli 1946, Konstitusi *Malayan*

¹⁸ Periksa Khoo Kay Kim, "Konflik Perkauman: Satu Perspektif Sejarah," *Dewan Masyarakat*, 9 September 1991, hlm. 15.

¹⁹ Lihat Lampiran Anggaran Dasar Partai Kebangsaan Melayu Malaya. Dalam konteks sekarang, pernyataan "Indonesia—Malaya satu" atau "Republik Indonesia Raya" mesti dimaknai dalam konteks sosio-kultural, dan bukan dalam pengertian politik.

²⁰ Salah satu resolusi hasil Kongres Pertama PKMM di Ipoh, Perak, 30 November sampai 3 Desember 1945

²¹ Pertumbuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (Pekembar) atau United Malays National Organisation (UMNO) kemudian resmi berdiri tanggal 11 Mei 1946.

Union dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, pembentukan *Malayan Union* pun, dibatalkan.

Betapapun apa yang diperjuangkan UMNO--PKMM itu sudah memperlihatkan hasil yang baik, dalam perkembangannya kemudian, terjadi perpecahan mengingat cara-cara perjuangan kedua organisasi itu berbeda. PKMM sejak awal melaksanakan perjuangan secara radikal. Slogan perjuangannya yang terkenal: "Merdeka dengan Darah" atau "Keras lawan Keras, Senjata lawan Senjata" menunjukkan bahwa perjuangan yang dilakukan PKMM, non-kooperatif, jika perlu dengan mengangkat senjata dan pertumpahan darah. Tujuan perjuangannya adalah Malaya segera memperoleh kemerdekaan sepenuhnya.

Dasar perjuangan UMNO berbeda dengan PKMM, walaupun tujuan akhirnya sama, yaitu mencapai kemerdekaan Tanah Melayu. UMNO melihat bahwa usaha mendirikan Malaya merdeka dirasakan terlalu awal, karena, menurut Dato Onn, orang Melayu belum cukup terlatih untuk mengurus sebuah negara yang merdeka. Di samping itu, perjuangan UMNO yang bersifat kooperatif, justru bertentangan dengan perjuangan PKMM yang non-kooperatif. Dasar perjuangan PKMM yang bertolak belakang dengan dasar perjuangan UMNO adalah usahanya untuk menghilangkan atau sekurang-kurangnya membatasi kekuasaan golongan bangsawan Melayu, sementara UMNO justru lahir dan mendapat dukungan golongan bangsawan. Di samping itu, perjuangan PKMM yang berkeinginan menjadikan Tanah Melayu sebagai sebuah negara republik dan menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia Raya, banyak ditolak pula oleh organisasi Melayu lainnya.

Perbedaan dasar perjuangan itu akhirnya membawa perpecahan. PKMM menyatakan keluar dari UMNO dan kemudian melakukan perjuangan sendiri dengan membentuk PUTERA, 22 Februari 1947; sebuah organisasi gabungan beberapa organisasi politik keras yang sebagian berhaluan kiri, antara lain, Angkatan Muda Insaf (API), Angkatan Wanita Sedar (AWAS), Hisbul Muslimin (Islam), Gerakan Muda (GERAM), dan beberapa organisasi kecil lainnya. Belakangan, ketika beberapa organisasi kiri non-Melayu membentuk sebuah organisasi gabungan yang bernama *All Malayan Council of Joint Action* (AMCJA) yang dipimpin Tan Cheng Lock, PUTERA juga menyusun kerja sama dengan organisasi ini. Setelah itu, tuntutan-tuntutan kepada Inggris agar Malaya segera memperoleh kemerdekaan, terus dilakukan dengan gencar.

Gabungan PUTERA dan AMCJA yang juga dikenal sebagai Gerakan Kiri Rakyat Malaya Bersatu itu menolak rencana konstitusi Persekutuan Tanah Melayu

yang disusun Inggris dan UMNO.²² Dalam hubungan itu, PUTERA--AMCJA lalu mengajukan bentuk konstitusi lain yang lebih dikenal dengan Konstitusi Rakyat Tanah Melayu. Konstitusi inilah yang menjadi landasan dasar kedua organisasi dalam perjuangan untuk mencapai sebuah negara Malaya yang merdeka. Dengan perkataan lain, konstitusi ini sebenarnya hendak memaksa Inggris agar segera memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Inggris sendiri tetap pada pendiriannya untuk memberlakukan konstitusi Persekutuan Tanah Melayu yang disusun bersama UMNO, sementara UMNO beralasan bahwa kedudukan politik orang Melayu belum cukup kuat untuk menjalankan sebuah pemerintahan sendiri yang merdeka. Oleh karena itu, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu lebih sesuai dengan keinginan dan kepentingan orang Melayu sendiri. Penolakan UMNO tentu saja membuat hubungan PUTERA--AMCJA dan UMNO, berubah menjadi pertentangan terbuka.

Bagi Inggris persoalan sebenarnya bukanlah pada konstitusi yang mana yang lebih dapat diterima masyarakat Melayu, melainkan keengganan Inggris untuk menerima PUTERA dan AMCJA yang berhaluan kiri radikal. Pilihan Inggris jatuh pada UMNO yang lebih moderat dan kooperatif. Oleh karena itu, konstitusi yang telah direncanakan semula tetap diberlakukan, dan pada tanggal 1 Februari 1948, pemerintah Inggris mengumumkan berdirinya Pemerintahan Persekutuan Tanah Melayu.

Dalam perkembangannya, aktivitas PUTERA, AMCJA, API, PKMM dan beberapa organisasi politik lainnya makin mengkhawatirkan pihak Inggris. Inggris beranggapan bahwa jika kegiatan itu terus berlanjut dan tetap dibiarkan begitu saja, Tanah Melayu akan terjerumus pada jurang kekacauan. Dalam pada itu, Partai Komunis Malaya makin leluasa menyelusupkan pengaruhnya kepada organisasi-organisasi berhaluan kiri. Malahan, tiga pembunuhan telah mereka lakukan terhadap warganegara Inggris yang bekerja di perkebunan. Dalam bulan Juni 1948, keganasan PKM makin luas. D.G.E. Hall²³ mencatat peristiwa itu sebagai berikut:

Peladang-peladang Eropah, pelombong-pelombong dan orang China yang menjadi ahli parti-parti Kuomintang telah dibunuh. Keganasan seperti ini bertujuan merintis jalan untuk memberontak. Rancangan permulanya ialah hendak mendapatkan satu kawasan di bawah kuasa pegganas dan mengisytiharkan sebagai satu kawasan Komunis yang merdeka, kemudian sedikit demi sedikit meluaskan kuasanya ke seluruh negeri. Dokumen sulit

²² B. Simandjuntak, *Malayan Federalism 1945—1963: A Study of Federal Problems in a Plural Society*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969), hlm. 48-49.

²³ D.G.E. Hall, *Sejarah Asia Tenggara*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987), hlm. 1023.

mereka yang telah dijumpai menunjukkan bahwa pengisytiharan Republik Komunis Malaya telah ditetapkan pada 3hb. Ogos, 1948.

Walaupun dalam dokumen rahasia Partai Komunis Malaya (PKM) dinyatakan bahwa proklamasi Republik Komunis Malaya akan dilakukan tanggal 3 Agustus 1948, dan pihak Komunis pada bulan Juni dan Juli 1948, telah melakukan aksi pemberontakan, kenyataan rencana proklamasi itu gagal. Pihak Inggris segera memberlakukan undang-undang darurat, 12 Juli 1948. Segera setelah itu PKM dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Pelarangan ini juga kemudian berlaku untuk organisasi-organisasi kiri yang radikal atau organisasi yang dicurigai banyak disusupi anggota PKM. Dalam kasus ini PUTERA dan API dinyatakan termasuk organisasi terlarang. Para pemimpinnya banyak yang ditangkap. Sementara PKMM dan beberapa organisasi kiri lainnya diharapkan agar segera mendaftarkan anggota-anggotanya atau memilih membubarkan diri. Karena berbagai tekanan dari pihak Inggris, PKMM kemudian memilih membubarkan diri, sementara tidak sedikit dari tokoh sentral PKMM memilih melanjutkan perjuangannya dengan masuk ke dalam UMNO.

Sejak pembubaran organisasi-organisasi itu, UMNO tampil mengisi kekosongan, karena UMNO-lah satu-satu organisasi politik yang mendapat restu pemerintah Inggris. Dalam perkembangannya, perjuangan UMNO mulai berubah, terutama setelah Tunku Abd. Rahman menjadi Ketua UMNO. Perjuangannya kemudian tidak hanya untuk kepentingan golongan Melayu, tetapi juga golongan non-Melayu serta tetap berusaha memperoleh kemerdekaan dari tangan Inggris. Belakangan, setelah UMNO membentuk Partai Perikatan, yang merupakan koalisi dari UMNO, *Malayan Chinese Association* (MCA) dan *Malayan Indies Congres* (MIC). Perjuangan UMNO tidaklah sia-sia. Setelah Pemilu pertama, 31 Juli 1955, Partai Perikatan yang didominasi UMNO, memperoleh kemenangan gemilang. Tunku Abd. Rahman kemudian menjadi Ketua Menteri Pertama untuk tanah Melayu mulai 31 Juli 1957. Sebulan kemudian, Persekutuan Tanah Melayu memperoleh kemerdekaannya, 31 Agustus 1957.

Pelajaran apa yang dapat kita tangkap dari sejarah masa lalu bangsa serumpun ini? Malaysia yang membangun negerinya dengan semangat kebudayaan Melayu, telah berhasil menempatkan negerinya dalam posisi yang sangat penting dalam hubungan sosial-politik-budaya di kawasan Semenanjung. Singapura yang merdeka dan menjadi negara mandiri setelah lepas dari Malaysia tahun 1965, telah berhasil mengangkat negara kota ini begitu kuat secara ekonomi. Brunei Darussalam yang merdeka 1 Januari 1984, telah menjadi negara terkaya di dunia. Bagaimana dengan posisi Indonesia? Bagaimana pula Riau menempatkan dirinya sebagai puak Melayu dalam konteks keindonesiaan?

Secara politik ada batas-batas yang jelas yang memisahkan puak Melayu ke dalam wilayah geografi Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sejarah telah mencatat, betapa usaha menyatukan puak Melayu secara politik, selalu gagal lantaran di dalamnya ada masalah politik yang tak gampang diselesaikan. Oleh karena itu, usaha penyatuan puak Melayu secara politik, juga sudah tidak realistik lagi. Lalu, apakah dengan demikian membangun kembali kebesaran Melayu, juga menjadi sesuatu yang mustahil dilakukan? Di sinilah, Riau yang pernah menjadi pusat kebudayaan Melayu mempunyai posisi yang sangat strategis. Ia secara emosional, kultural, dan sosial, mempunyai ikatan tradisional yang sulit dipisahkan. Sebagai puak Melayu, Riau dalam pengertian kultural, seperti merasa tidak mempunyai sekat yang menghalangi hubungan sosio-kultural dengan saudara-saudaranya di wilayah Semenanjung.

Kondisi tersebut sesungguhnya merupakan peluang yang memungkinkan Riau dapat bertindak lebih leluasa. Memanfaatkan puak Melayu sebagai aset lokal yang punya hubungan nasional dan sekaligus regional. Dalam konteks kebudayaan pula, membangun kembali kebesaran Melayu dapat melampaui batas-batas politik dan geografi sebuah negara. Jadi, atas nama kebudayaan Melayu, emosi kemelayuan dapat menjadi tali pengikat harapan dan cita-cita bersama, meski sebagai warga bangsa, ada perbedaan politik yang melekat di sana.

Dalam konteks keindonesiaan, puak Melayu telah memberi sumbangan yang sangat berarti bagi Indonesia, yaitu dengan diangkatnya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, bahasa nasional yang juga milik etnis lain. Inilah sumbangan kebudayaan Melayu yang tidak ternilai harganya bagi sebuah negeri yang bernama Indonesia. Jika dalam perkembangannya bahasa Indonesia tidak terlalu gampang dipahami oleh warga pemilik asalnya – masyarakat Melayu — sesungguhnya itu merupakan konsekuensi logis dari karakter bahasa Melayu sendiri yang luwes, sederhana, dan inklusif.

Di masa depan, kiprah yang telah diperlihatkan kebudayaan Melayu itu, tentu saja dapat terus dikembangkan dengan menjalin kehidupan sosio-kultural dengan masyarakat serantau. Hanya dengan itu, Riau sebagai sentra kebudayaan Melayu, dapat memainkan peranannya lebih jauh, sebagaimana yang pernah dilakukannya jauh sebelum wujud sebuah negeri yang bernama Indonesia. Masalahnya tinggal, bagaimana masyarakat Melayu sendiri menyadari dan berusaha mengangkat kembali kebesaran kebudayaannya, baik dalam lingkup keindonesiaan (nasional), keserumpunan (regional), maupun lingkup global (internasional).

Maka, pancangkanlah kebesaran kebudayaan Melayu sebagaimana dinyatakan dalam ruh yang mendiami

semangat kebudayaannya: "Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang".

Daftar Acuan

Groeneboer, Kees. 1995. *Jalan ke Barat: Bahasa Belanda di Hindia Belanda 1600—1950*. Jakarta: Erasmus Taalcentrum.

Hall, D.G.E. 1987. *Sejarah Asia Tenggara*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hussain, Shaharom. 1985. *Biografi Perjuangan Politik Dato' Jaafar*. Petaling Jaya: Fajar Bakti.

Kadir, Kamaruzzaman Abd. 1982. *Nasionalisme dalam Puisi Melayu Moden: 1933—1957*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Keboedajaan Timoer, No. 1, 18 September 2603, hlm 1.

Khoo Kay Kim, "Konflik Perkauman: Satu Perspektif Sejarah," *Dewan Masyarakat*, 9 September 1991.

Li Chuan Siu. 1967. *Ikhtisar Sejarah Pergerakan dan Kesusasteraan Melayu Modern 1945—1965*. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

Mahayana, Maman S. 2001. *Akar Melayu: Sistem Sastra & Konflik Ideologi di Indonesia dan Malaysia*. Magelang: Indonesia Tera.

Ricklefs, MC. 1992. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Simandjuntak, B. 1969. *Malayan Federalism 1945—1963: A Study of Federal Problems in a Plural Society*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Wahid, Zainal Abidin Abdul. 1979. *Sejarah Malaysia Sepintas Lalu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Lampiran

ANGGARAN DASAR PARTAI KEBANGSAAN MELAYU MALAYA

(Sumber: Arsip Negara Malaysia)

1. Untuk menyatukan bangsa Melayu dan menanamkan semangat kebangsaan dalam jiwa orang Melayu dengan tujuan besar untuk menyatukan Malaya dengan Indonesia sebagai Republik Indonesia Raya.
2. Untuk memperjuangkan kebebasan bersuara, berkarya, berkumpul dan kebebasan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan.
3. Untuk meningkatkan ekonomi orang Melayu.
4. Untuk memperjuangkan kebebasan dalam pertanian, yang dimaksud pajak tidak dikenakan pada tanah-tanah pertanian dan petani bebas menjual hasil pertanian sesuka hati mereka.
5. Untuk memperjuangkan kebebasan mutlak bagi orang Melayu, mendirikan sekolah-sekolah pemerintah, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah.
6. Untuk menggalakkan penerbitan buku-buku yang akan mendaftarkan demokrasi dan dalam masa yang sama mengembangkan kedudukan politik Melayu dan jiwa kebangsaan.

7. PKMM harus menjalin silaturahmi dengan kaum-kaum lain di negara ini untuk membentuk Malaya bersatu dan makmur sebagai komponen Republik Indonesia Raya.
8. Menyokong pergerakan nasionalis Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.

Ada beberapa pertimbangan yang mendasari pembicaraan situasi sosial yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. *Pertama*, tumbuhnya nasionalisme Malaysia justru baru memperoleh bentuk yang lebih jelas setelah usai perang Pasifik. *Kedua*, kesadaran kemelayuan yang lebih bercorak kebangsaan juga terjadi pada periode pascaperang. *Ketiga*, setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya yang tidak menyertakan Tanah Melayu, hubungan dan semangat para tokoh nasionalis Melayu masih berorientasi ke Indonesia, bahkan mereka cenderung melakukan perjuangan kemerdekaannya juga dengan usaha mengangkat senjata, yang ternyata kurang cocok diterapkan di sana mengingat: (1) kedatangan Inggris sangat tepat pada saat Malaysia sedang dilanda kerusuhan rasial, (2) para sultan dan tokoh elite yang lain, cenderung bersikap moderat dan kooperatif, (3) kekejaman Partai Komunis Malaysia yang terjadi selepas Jepang menyerah, memberi kesan yang mendalam sebagai sebuah trauma bagi warga Melayu. *Keempat*, persoalan kemelayuan lebih memerlukan perhatian dalam perjuangan periode itu yang kelak akan terus dilanjutkan dalam periode berikutnya.